



Tanggal
23/9/2016



Si
B

TANAMI PISANG - Warga yang tinggal di jalan Parit Haji Muksin 2 di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya menanam jalan itu dengan pohon pisang pada aksi blokade, Rabu (21/9) lalu. Kini, warga sudah membuka blokade jalan itu setelah mengetahui jika jalan sudah dianggarkan sebesar Rp1,6 miliar untuk dibangun.

SUARA PEMRED/JA KAI SWARA



Rp2,6 M Bangun Jalan Muksin

► Warga Buka Blokade Jalan

Chairil Rahmi

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan KKR

Meski mengalami defisit, program yang sudah dianggarkan tetap kita laksanakan dengan kemampuan yang ada. Tidak semuanya bisa kita langsung laksanakan, ada beberapa program diputuskan oleh pusat untuk ditunda dan akan dilanjutkan di tahun 2017 mendatang.

KUBU RAYA, SP – Blokade atau penutupan Jalan Parit Haji Muksin 2 di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada Rabu (21/9) akhirnya dibuka. Masyarakat mau membuka blokade jalan setelah mendapat penjelasan dari pejabat legislatif dan eksekutif setempat.

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi tutup jalan sebagai wujud kekecewaan warga yang menganggap Pemkab Kubu Raya tidak kunjung membangun Jalan Parit Haji Muksin 2 yang rusak. Warga semakin berang terkait rumor pembangunan jalan itu dibatalkan karena anggaran daerah mengalami defisit.

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan KKR, Chairil Rahmi mengungkapkan bahwa tidak ada pembatalan program pembangunan jalan yang sudah dianggarkan di tahun 2016, termasuk Jalan parit Haji Muksin 2.

“Meski mengalami defisit, program yang sudah dianggarkan tetap kita laksanakan dengan kemampuan yang ada. Tidak semuanya bisa kita langsung laksanakan, ada beberapa program diputuskan oleh pusat untuk ditunda dan akan dilanjutkan di tahun 2017 mendatang,” ujar Chairil.

Untuk Jalan Parit H Muksin 2, lanjut Chairil, pembangunannya menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan anggaran sebesar Rp2 miliar, ditambah bagian lain sebesar Rp600 juta, sehingga total pengerjaan jalan itu sebesar Rp2,6 miliar.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD KKR, Suharso mengaku responsif begitu mengetahui ada aksi blokade jalan. Pada saat itu juga pihak DPRD langsung menggelar pertemuan dengan perwakilan warga dan pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan KKR.



Pajak Daerah Tak Optimal

PLT Sekda Kubu Raya, Odang Presetyo mengungkapkan, defisit anggaran karena struktur APBN pusat yakni pajak daerah yang tidak terpenuhi atau tak optimal.

"Sehingga berdampak pada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU), baik pada kementerian, pemprov hingga pemkab," ujar Odang.

Odang menjelaskan, adanya pembatalan pada kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD 2016 bisa saja terjadi, namun pembatalan itu lebih

cenderung kepada kegiatan yang tidak penting dan tidak strategis.

Untuk kegiatan yang penting dan strategis perlu pengkajian terlebih dahulu.

"Sejauh ini belum ada belum ada pembatalan program yang penting dan strategis seperti pembatalan kegiatan pembangunan jalan poros yang menjadi skala prioritas. Untuk melakukan pembatalan, tentunya harus dari hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif," pungkasnya. **(jek/bah)**

"Kami sudah panggil pihak yang terkait mulai dari warga, Dinas Bina Marga, Kepala Bappeda Kubu Raya dan Sekda Kubu Raya. Adanya aksi penutupan Jalan Parit Haji Mukisn 2 ini karena kesalahan informasi yang diterima, baik pelaksana pekerjaan maupun warga," ujar Suharso, Kamis (22/9).

Hasil dari pertemuan itu, kata Suharso, baru diketahui terjadi miskomunikasi kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat setempat dan pelaksana pekerjaan Jalan Parit Haji Mukisn 2.

Masyarakat beranggapan jalan itu sudah dianggarkan pada 2016, namun informasi yang berkembang, pengerjaan jalan itu dibatalkan.

"Informasi itu semuanya tidak benar. Setelah mendapat penjelasan, penutupan jalan sudah dibuka oleh masyarakat di hari yang sama," ujarnya.

Menurut Suharso, siapapun berhak melupakan kekecewaan dengan melakukan orasi atau aksi damai karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun, sebelum melakukan aksi, informasi yang diterima warga mesti akurat dan jelas.

"Kegiatan fisik yang sudah dilelangkan memang banyak yang belum dilaksanakan karena pemkab masih menghitung seberapa besar rasionalisasi di Kubu Raya. Sampai saat ini pemkab tetap fokus untuk

menyelesaikan semua kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun 2016," tuturnya.

Sementara Anggota Badan Penganggaran (Banggar) DPRD KKR, Agus Sudarman-syah mengingatkan kepada masyarakat dan kontraktor pelaksana untuk tidak resah dan gusar, dalam menyikapi informasi yang berkembang tentang dampak defisit APBD KKR tahun 2016.

"Selama perda belum ada perubahan, maka kegiatan yang tercantum dalam perda itu, terutama kegiatan fisik Kubu Raya, wajib dilaksanakan," kata Agus.

Terjadinya defisit anggaran, kata Agus, Pemkab Kubu Raya terus berupaya mencari solusi. Jika solusi sudah ditemukan dan terjadi perubahan pada APBD Kubu Raya tahun anggaran 2016, perubahan itu tidak signifikan dari kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD 2016.

"Kemungkinan penambahan kegiatan baru saja yang tidak ada. Kegiatan yang telah dituangkan di dalam perda itu tetap harus dilaksanakan," kata Agus.

Agus menambahkan jika terjadi rasionalisasi dampak dari defisit anggaran, maka rasionalisasi itu hanya pada kegiatan-kegiatan rutin, seperti kegiatan belanja pegawai perjalanan dinas, bukan kegiatan fisik yang bersifat prinsip. **(jek/bah)**